

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PENGATURAN TRANSPORTASI *ONLINE*

Oleh:

M. Unggul Garfli¹ dan Rizky Septiana Widyaningtyas S.H., M.Kn.²

INTISARI

Transportasi semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana implikasi putusan Mahkamah Agung terhadap perubahan pengaturan mengenai transportasi *online* dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan yang ideal mengenai penyelenggaraan transportasi *online*.

Metode penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan cara mengkaji studi dokumen menggunakan data sekunder.

Putusan Mahkamah Agung berpengaruh terhadap pengaturan transportasi online dengan dibatalkannya beberapa poin, dimasukkannya kembali beberapa poin di pengaturan yang baru oleh Kementerian Perhubungan karena aturan tersebut bersesuaian dengan aturan yang lebih tinggi hierarkinya dan pengaturan yang ideal adalah yang tidak bertentangan dengan aturan sesuai hierarkinya dan tidak memiliki unsur kepentingan oknum tertentu.

Hasil dan tujuan tersebut dapat di implementasikan kepada masyarakat sesuai aturan untuk ketertiban dalam penyelenggaraan transportasi *online*.

Kata Kunci : Transportasi, *Online*, Kebijakan, aturan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

***JURIDIS REVIEW OF GOVERNMENT POLICY ON ONLINE
TRANSPORTATION SETTINGS***

By:

M. Unggul Garfli³ dan Rizky Septiana Widyaningtyas S.H., M.Kn.⁴

Abstract

Transportation is growing with the development of modern times. This study aims to know and examine how the implications of Supreme Court decisions on changes in arrangements on online transport and to find out how the ideal arrangement of online transport operations.

This research method of law writing using normative research method, that is by studying document study using secondary data.

The Supreme Court ruling has an effect on the online transport arrangements with the cancellation of several points, the re-inclusion of several points in the new arrangement by the Ministry of Transportation because the rules correspond to the higher rules of the hierarchy and the ideal arrangements are those that do not contradict the rules according to hierarchy and have no elements interests of a particular person.

The results and objectives can be implemented to the public according to the rules for order in the provision of online transportation.

Keywords: Transportation, Online, Policy, rules.

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

⁴ Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada